



Organisasi
Perburuhan
Internasional
Jakarta



PANDUAN MENDIRIKAN Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia

PANDUAN MENDIRIKAN

LAYANAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA



Kantor Perburuhan Internasional

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2003

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian singkat dari publikasi-publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, insitusi-institusi dan para pengguna lain yang terdaftar di Inggris dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1P 9HE (Fax: + 44 171 436 3986), di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 (Fax: + 1 508 750 4470) atau di negara-negara lain dengan Organisasi-organisasi Hak Reproduksi yang terkait, dapat membuat fotokopi sesuai dengan izin yang dikeluarkan bagi mereka untuk kepentingan ini.

ILO

Kantor Perburuhan Internasional, 2005

“Panduan Mendirikan Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia”

Judul Bahasa Inggris: *“Guidelines for establishing Emergency Public Employment Services”*

ISBN 92-2-817032-8

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktek-praktek Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab pengarang seorang, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat didalamnya.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.

Rancangan dan cetakan: International Training Centre ILO, Turin - Italia
versi Indonesia dicetak di Jakarta, Indonesia



SAMBUTAN MENAKERTRANS

Assalamualaikum wr. wb.

Tragedi bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di beberapa kawasan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah merubah kondisi kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Diperkirakan sekitar 300.000 penduduk menjadi korban, baik meninggal maupun belum ditemukan keberadaannya; infrastruktur dan kelembagaan ekonomi hancur, sementara itu sektor pemerintahan daerah belum dapat pulih dalam waktu singkat. Bencana tersebut juga telah mengundang simpati dunia, baik dari PBB, negara-negara sahabat, organisasi internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta relawan dari berbagai pelosok dunia.

Depnakertrans RI sebagai partner ILO menyambut baik upaya lembaga ini untuk melakukan aksi nyata guna memulihkan dan merevitalisasi situasi ketenagakerjaan yang terimbas oleh bencana. Salah satu upaya yang diharapkan sangat bermanfaat bagi ketenagakerjaan di kawasan bencana adalah dibentuknya lembaga layanan ketenagakerjaan publik darurat. Kami yakin bahwa “Buku Panduan Mendirikan Layanan Ketenagakerjaan Publik Darurat” yang merupakan rangkuman dari pengalaman ILO di berbagai daerah bencana, baik karena konflik maupun bencana alam, akan bermanfaat bagi pemulihan sumberdaya manusia bagi pembangunan provinsi NAD dan Sumatera Utara, paska bencana alam.

Pembentukan layanan dimaksud diharapkan mampu mendorong masyarakat NAD dan Sumatera Utara untuk tidak terus terlelap oleh kesedihan bencana, namun segera bangkit kembali dengan bekerja giat membangun daerahnya. Pelayanan ini akan secara cepat berupaya mempertemukan “stock” tenaga kerja dan pihak-pihak yang membutuhkan

baik dalam rangka rekonstruksi maupun kegiatan pemulihan ekonomi daerah.

Akhirnya kita semua hanya dapat memohon kepada Allah SWT untuk selalu ditunjukkan jalan bagi setiap langkah ikhtiar yang kita lakukan agar nantinya mendapatkan ridho-Nya. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi Idris', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fahmi Idris



PENGANTAR DISNAKER NAD

Assalamualaikum wr. wb.

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengakibatkan kerusakan dan nyaris menghancurkan seluruh sarana dan prasarana serta menelan korban manusia yang cukup dasyat.

Dari data yang diperoleh, jumlah korban yang meninggal dan hilang telah mencapai 350.000 jiwa. Mereka yang selamat, walaupun harta bendanya telah musnah, kini tinggal dan tersebar di tempat-tempat pengungsian berkisar lebih dari 600.000 jiwa.

Dengan partisipasi dan bantuan dari berbagai komponen masyarakat, baik nasional maupun internasional, bagi kita yang selamat sudah saatnya untuk berpikir dan berusaha mengobati luka psikologis akibat berbagai rasa kepedihan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah soal ketidakberdayaan masyarakat, hilangnya kesempatan kerja dan berusaha, dan lain-lain, kehidupan yang bermuara pada terjadinya pengangguran.

Kiranya siapapun dia, keberadaan mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita, mereka berhak atas pekerjaan demi kehidupan dan masa depan. Dalam konteks ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ILO yang berkenan membuka perwakilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membantu menangani masalah-masalah ketenagakerjaan dan pengangguran dengan membuka layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

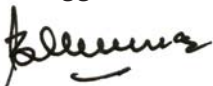
Mudah-mudahan mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan dan kini tersebar di berbagai tempat pengungsian maupun di tempat-tempat lainnya

dapat diberi program kegiatan dan pekerjaan melalui proses mekanisme antarkerja dan pembekalan pelatihan kerja.

Kami menyambut dengan hangat keberadaan ILO di tengah-tengah masyarakat Aceh. Semoga dengan kerjasama yang baik serta melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti LSM, baik nasional maupun internasional, serta pihak Pemerintah, upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara bertahap dapat dilaksanakan.

Wassalamualaikum wr. wb.

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**



Drs. A. Manan Ganto

PENGANTAR DIREKTUR ILO JAKARTA

Bencana dahsyat gempa bumi yang diikuti tsunami yang mengantam Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara di Indonesia pada 26 Desember 2004, telah menghancurkan wilayah tersebut dan menyebabkan lebih dari 350 ribu jiwa meninggal dan hilang serta ratusan ribu keluarga terpaksa tinggal di berbagai tempat pengungsian. Bencana alam ini telah menghancurkan kehidupan sebagian besar penduduk Aceh, dengan lebih dari 600,000 orang kehilangan pekerjaan. Tanpa adanya bantuan langsung, hilangnya lapangan kerja dan pendapatan akan menyebabkan banyak orang menghadapi kelaparan dan kemiskinan bahkan melebihi fase pasca-krisis saat ini.

Bagian terpenting dari pembangunan kembali kehidupan masyarakat adalah memberikan kembali mereka lapangan kerja. Pada tahap implementasi program pemulihan dan rehabilitasi pasca-krisis di setiap daerah bencana akan membuka banyak kesempatan kerja. Beberapa dari kesempatan kerja tersebut mungkin akan diisi sementara, beberapa lagi mungkin permanen, oleh orang-orang Aceh —sebelum beberapa dari mereka dapat kembali ke pekerjaan mereka semula di sektor perikanan dan pertanian.

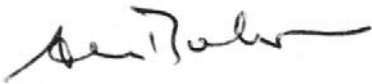
Beberapa pekerjaan rekonstruksi infrastruktur yang berbasis tenaga kerja mungkin tidak memerlukan tenaga kerja terlatih. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain boleh jadi memerlukan keterampilan tertentu, di mana setiap orang dapat memperoleh atau memerlukan siklus pelatihan singkat. Untuk memastikan orang-orang Aceh mendapat manfaat dari kesempatan-kesempatan tersebut, adalah penting untuk memberikan dan membangun kembali layanan ketenagakerjaan yang memungkinkan orang yang mencari pekerjaan dapat dipertemukan secara efektif dengan peluang pekerjaan yang tersedia.

Dengan pengalaman yang dimiliki ILO di bidang ini pada situasi pascakrisis di sejumlah negara, ILO menerbitkan panduan ini yang berjudul “Panduan Mendirikan Layanan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Indonesia”.

Dalam bencana alam, setiap layanan publik yang ada, yang biasanya disediakan oleh pemerintahan lokal, tidak dapat dijalankan. Sebagai tindak lanjut penilaian bersama Departemen Tenaga Kerja yang bekerjasama secara erat dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan di Kabupaten/Kota, ILO membantu pemerintah untuk mendirikan sejumlah pusat pelayanan publik ketenagakerjaan dengan melibatkan organisasi Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha setempat.

Pusat-pusat Layanan yang didirikan akan menerapkan panduan ini dalam upaya menjadi perantara kerja, layanan penempatan, dan informasi yang penting dibutuhkan oleh orang Aceh untuk memungkinkan mereka kembali bekerja.

Direktur ILO Jakarta



Alan J. Boulton

DAFTAR ISI

Daftar istilah

RINGKASAN

I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tujuan Panduan ini

2. KONDISI DAN KAJIAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN

- 2.1 Memahami Keadaan
- 2.2 Penanganan ILO atas Krisis
 - 2.2.1 Permasalahan-permasalahan Pokok
- 2.3 Intervensi-intervensi LKM
 - 2.3.1 Kegiatan Pelayanan Utama
 - 2.3.2 Bencana Alam
 - 2.3.3 Krisis Keuangan dan Ekonomi
 - 2.3.4 Konflik Bersenjata
 - 2.3.5 Transisi Sosial dan Politik yang Sulit
- 2.4 Kajian Kebutuhan-kebutuhan
 - Temuan-temuan Pokok dan Rekomendasi

3. FUNGSI LKM PASCA-KRISIS

- 3.1 Strategi-strategi Intervensi
 - 3.1.1 Menangani Kebutuhan-kebutuhan Krisis yang Teridentifikasi
- 3.2 Pendaftaran dan Pemberian Saran kepada Pencari Kerja
 - 3.2.1 Menggambarkan Profil Pencari Kerja
 - 3.2.2 Saran, Informasi dan Layanan Referensi bagi Pencari Kerja
- 3.3 Menghubungi Pengusaha dan Mendaftarkan Lowongan
 - 3.3.1 Menginformasikan Kepada Pengusaha Mengenai LKM
 - 3.3.2 Proyek-proyek Besar dan Institusi-institusi Internasional
 - 3.3.3 Melobi Penggunaan Teknologi Padat Karya

- 3.3.4 Pengusaha di Sektor Swasta
- 3.3.5 Layanan Masyarakat dan Pengusaha-Pengusaha di Sektor Publik
- 3.3.6 Lowongan
- 3.4 Kodifikasi Pekerjaan dan Industri
 - 3.4.1 International Standard Classification of Occupations (ISCO)
 - 3.4.2 Kode Industri
- 3.5 Informasi Pasar Kerja
 - 3.5.1 Membangun Pangkalan Data Informasi Pasar Kerja
- 3.6 Memenuhi Kebutuhan Pencari Kerja dalam Kategori-kategori Khusus
 - 3.6.1 Pengungsi Lokal
 - 3.6.2 Perempuan
 - 3.6.3 Pencari Pekerjaan dengan Cacat Fisik
 - 3.6.4 Kaum Muda dan Anak-Anak Putus Sekolah
 - 3.6.5 Prajurit yang Cacat karena Perang dan Mantan Tentara Lain
 - 3.6.6 Pekerja Lanjut Usia
- 3.7 Akses Jasa Layanan
- 3.8 Pengelolaan Ketenagakerjaan Khusus dan Langkah-langkah Pelatihan
- 3.9 Publikasi

4. MEMBANGUN LKM PASCA-KRISIS

- 4.1 Menetapkan Tujuan
- 4.2 Meninjau Ulang Lokasi
- 4.3 Struktur, Fungsi dan Staf Kantor
- 4.4 Fungsi Pusat Layanan Ketenagakerjaan (PLK)
- 4.5 Program Pengenalan dan Pelatihan untuk Staf
- 4.6 Pendanaan Operasi LKM
- 4.7 Strategi Kemitraan dan Kerja Sama
- 4.8 Dewan Penasehat
 - 4.8.1 Peran Dewan Penasehat
 - 4.8.2 Fungsi Dewan Penasehat
- 4.9 Pengaturan Layanan Bersama
- 4.10 Bekerja sama dengan PBB dan Badan Internasional Lainnya
- 4.11 Bekerja sama dengan LSM, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lokal
- 4.12 Institusi-Institusi Jasa Layanan Ketenagakerjaan Swasta
- 4.13 Daftar Implementasi



5. MENGELOLA LKM DAN MENGAJI ULANG KINERJA

- 5.1 Manajemen
 - 5.1.1 Masukan, Proses, dan Keluaran
- 5.2 Menetapkan Hasil Akhir dan Tujuan
- 5.3 Perencanaan Operasional
 - 5.3.1 Rencana Kerja

6. MEMPERKUAT LKM JANGKA PANJANG

- 6.1 Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional
- 6.2 Perluasan Akses dan Pelayanan

Lampiran 1. Daftar Pustaka

Lampiran 2. Pendaftaran Pencari Kerja

- A 2.1 Formulir Pendaftaran Pencari Kerja
- A 2.2 Melengkapi Formulir Pendaftaran Pencari Kerja
- A 2.3 Prosedur Pembaharuan Informasi
- A 2.4 Arsip Pencari Kerja
- A 2.5 Pencari Kerja Aktif
- A 2.6 Kartu Indeks
- A 2.7 Formulir Pendaftaran Pencari Kerja Tidak Aktif

Lampiran 3. Pendaftaran Lowongan Kerja

- A 3.1 Formulir Pendaftaran Lowongan Kerja
- A 3.2 Mengisi Formulir Pendaftaran Lowongan Kerja
- A 3.3 Mempertemukan Pencari Kerja dengan Lowongan Kerja

Lampiran 4. Kodifikasi Pekerjaan dan Industri

- A 4.1 Standar Internasional untuk Klasifikasi Kerja
- A 4.2 Kodifikasi Pekerjaan
- A 4.3 Kodifikasi Industri

Lampiran 5. Catatan Statistik dan Sistem Pelaporan LKM

- A 5.1 Pendahuluan
- A 5.2 Hasil Statistik Pelayanan Ketenagakerjaan
 - A 5.2.1 Statistik Harian
 - A 5.2.2 Statistik Bulanan
 - A 5.2.3 Statistik Triwulan
- A 5.3 Laporan Kegiatan
 - A 5.3.1 Formulir Catatan Layanan Pemberian Saran
 - A 5.3.2 Laporan Kegiatan Harian

- A 5.3.3 Laporan Kegiatan Bulanan
- A 5.3.4 Laporan Triwulan mengenai Lowongan berdasarkan Pekerjaan
- A 5.3.5 Laporan Kegiatan Tahunan

Lampiran 6. Kebutuhan-Kebutuhan Pangkalan Data Pasar Kerja

- A 6.1 Persyaratan Pangkalan Data Pasar Kerja
 - A 6.1.1 Dokumen-Dokumen Sumber
 - A 6.1.2 Cakupan
 - A 6.1.3 Daftar Pengusaha
 - A 6.1.4 Daftar Institusi Pelatihan
 - A 6.1.5 Informasi di Sisi Persediaan
- A 6.2 Metode-Metode Pengumpulan Informasi dan Data
- A 6.3 Memperluas Pangkalan Data
- A 6.4 Laporan dan Keterangan
- A 6.5 Sumber-Sumber Lain

Lampiran 7. Pengelolaan Ketenagakerjaan Khusus dan Langkah-Langkah Pelatihan

- A 7.1 Wirausaha dan Bantuan dan Pengembangan Usaha Kecil
- A 7.2 Bimbingan dan Penyuluhan Kejuruan
- A 7.3 Skema Pelatihan Kejuruan dan Skema Pelatihan di Tingkat Penerimaan
- A 7.4 Skema Pelatihan bagi Kaum Muda
- A 7.5 Migrasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri
- A 7.6 Program Pekerjaan Umum yang berbasis tenaga kerja
- A 7.7 Tunjangan Pelatihan
- A 7.8 Skema Subsidi Upah
- A 7.9 Program Ketenagakerjaan Komunitas
- A 7.10 Menangani Tumpang Tindih Massal
- A 7.11 Pelatihan dan Pelatihan Keterampilan Ulang
- A 7.12 Skema Pembelajaran Jarak Jauh
- A 7.13 Dukungan Pendapatan
- A 7.14 Bantuan Sosial (Tunai)

Lampiran 8. Persyaratan Minimum untuk Mendirikan Fasilitas PLK

Lampiran 9. Deskripsi Pekerjaan dan Kriteria Seleksi

Lampiran 10. Program Pengenalan dan Pelatihan

- Program Pengenalan (Indikatif)
- Program Pelatihan Staf

Lampiran 11. Rencana Kerja PLK Provisional

DAFTAR ISTILAH

ASIST	<i>Advisory Support Information Services and Training Programme</i> (Program Pelatihan dan Layanan Informasi Pendukung)
DDR	<i>Disarmament, Demobilization and Reintegration</i> (Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi)
OPC	Organisasi Penyandang Cacat (<i>Disabled Persons Organization</i>)
LK	Layanan Ketenagakerjaan (<i>Employment Services</i>)
PLK	Pusat Layanan Ketenagakerjaan (<i>Employment Service Centre</i>)
PIPK	Program Investasi Padat Karya (<i>Employment-Intensive Investment Programme</i>)
PLIK	Pusat Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan (<i>Employment Information Service Centre</i>)
GOSL	<i>Government of the Socialist Democratic Republic of Sri Lanka</i> (Pemerintah Republik Demokrasi Sosial Sri Lanka)
IFP/CRISIS	<i>InFocus Programme on Crisis Response and Reconstruction</i> (Program Khusus mengenai Penanganan Krisis dan Rekonstruksi)
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Perburuhan Internasional)
IOM	<i>International Organization for Migrations</i> (Organisasi Internasional untuk Migrasi)
SIKP	Standar Internasional untuk Klasifikasi Pekerjaan (<i>International Standard Classification of Occupations</i>)
SIKI	Standar Internasional untuk Klasifikasi Industri (<i>International Standard Industry Classification</i>)

PEL	Pembangunan Ekonomi Lokal (<i>Local Economic Development</i>)
IPK	Informasi Pasar Kerja (<i>Labour Market Information</i>)
LTTE	<i>Liberation Tigers of Tamil Eelam</i> (Pembebasan Macan Tamil Eelam)
BKN	Biro Ketenagakerjaan Nasional (<i>National Employment Bureau</i>)
KKNPRR	Komite Koordinasi Nasional Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (<i>National Coordinating Committee on Relief, Rehabilitation and Reconciliation</i>)
BPS	Badan Pusat Statistik
LSM	Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (<i>Non-Governmental Organizations</i>)
LKM	Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat (<i>Public Employment Services</i>)
LKS	Lembaga Ketenagakerjaan Swasta (<i>Private Employment Agencies</i>)
REIP	<i>Rapid Employment Impact Project</i> (Proyek Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja yang Cepat)
SIYB	<i>Start and Improve Your Business Programme</i> (Program Memulai dan Meningkatkan Usaha Sendiri)
TP	Tunjangan Pengangguran (<i>Unemployment Benefits</i>)
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations</i>)
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi)
WAPES	<i>World Association of Public Employment Services</i> (Asosiasi Dunia untuk Layanan Ketenagakerjaan Publik)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Layanan Ketenagakerjaan (LK) membangun jembatan yang penting antara para pencari kerja dan kesempatan kerja. Layanan ini menjadi lebih penting pada masa pemulihan pasca-krisis, ketika terjadi perubahan besar dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang muncul dalam tempo yang sangat cepat, dan kian mendesaknyanya kebutuhan-kebutuhan para pencari pekerjaan dan calon pemberi pekerjaan.

Berbagai persoalan ketenagakerjaan muncul secepat fase pasca-krisis itu sendiri, ketika tenaga kerja dibutuhkan untuk memberikan layanan-layanan pemulihan, tetapi mereka menjadi lebih penting lagi ketika tahap rekonstruksi dimulai. Di sisi penawaran, terdapat banyak korban krisis yang mencari pekerjaan yang produktif yang akan dapat memberikan penghidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka. Di sisi permintaan, rekonstruksi sosial, layanan reintegrasi sosial-ekonomi dan dimulainya (kembali) kegiatan ekonomi semuanya membutuhkan tenaga kerja dan keterampilan-keterampilan tertentu. Kesempatan kerja di sektor formal mungkin berkurang, tetapi ada pilihan-pilihan untuk berwirausaha dan hal itu patut dipertimbangkan. Setiap kondisi pasca-krisis memerlukan sejumlah tugas-tugas pokok yang biasanya dilaksanakan oleh layanan-layanan ketenagakerjaan, seperti pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, mempertemukan di antara keduanya, rekrutmen pekerja untuk program-program ketenagakerjaan khusus dan memastikan prinsip non-diskriminasi dalam akses kesempatan kerja. Tugas-tugas yang terkait mencakup pengkajian secara cepat mengenai pasar kerja, membuat rujukan orang-orang pada program-program pelatihan dan menyediakan penyuluhan mengenai pilihan-pilihan kewirausahaan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, ILO bersama Disnaker Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah membuat proyek percontohan yang memperkenalkan pusat-pusat LK pasca-krisis dalam berbagai situasi pasca-krisis. Kadang-kadang pusat-pusat LK itu hanya terdiri dari sebuah tenda di mana beberapa staf melaksanakan kegiatan untuk mempertemukan para pencari pekerja dengan pekerjaan-pekerjaan dasar, dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi layanan ketenagakerjaan yang lebih solid dan permanen.

Panduan untuk membangun layanan ketenagakerjaan masyarakat ini telah disiapkan untuk membantu para praktisi mengembangkan layanan ketenagakerjaan pasca-krisis yang efektif dan efisien dalam kondisi krisis. Panduan ini dirancang untuk menyediakan referensi cepat mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengenalan layanan seperti ini.

ILO menangani empat jenis krisis: bencana alam, krisis keuangan dan finansial, konflik bersenjata, dan transisi sosial dan politik yang sulit. IFP/CRISIS hendak mengadaptasikannya dengan tujuan menyeluruh ILO dalam konteks pasca-krisis untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif berlandaskan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, keamanan dan martabat manusia.

Agenda Pekerjaan yang Layak yang diperkenalkan ILO memiliki tujuan pengembangan yang luas, tetapi hal ini juga terbukti dapat menjadi tali yang kuat yang dapat menarik individu-individu dan masyarakat melewati krisis dan menempatkan mereka pada jalan pembangunan yang damai dan progresif.

ILO telah terlibat dalam penanganan krisis bersama PBB atau atas prakarsanya sendiri di 40 negara, termasuk Afghanistan, Indonesia, Namibia, Afrika Selatan, El Salvador, Bekas Pecahan Yugoslavia, Sierra Leone, Palestina, Timor Leste dan Sri Lanka. Relevansi layanan ketenagakerjaan jelas-jelas dapat dilihat di hampir semua kegiatan tersebut.

Kegiatan layanan ketenagakerjaan dalam situasi pasca-krisis akan tergantung pada sifat dan cakupan krisis yang ada. Peran LK dapat meliputi dukungan bagi prakarsa-prakarsa khusus yang dikembangkan untuk

membantu kelompok sasaran khusus atau menyediakan bantuan yang lebih umum yang terkait dengan ketenagakerjaan bagi semua pencari kerja dan calon-calon pemberi kerja. Lembaga-lembaga layanan ketenagakerjaan swasta (LKS) dapat beroperasi di beberapa sektor pasar kerja, tetapi pemerintah pusat memiliki tanggungjawab yang menyeluruh untuk memberikan layanan ketenagakerjaan masyarakat (LKM), terutama di saat krisis. Di luar kondisi krisis, LKM dapat menjalankan sejumlah fungsi dan layanan, tetapi hal ini masih harus disesuaikan dengan situasi tertentu. Layanan atau pendekatan baru mungkin telah dikembangkan pada saat belum ada layanan semacam itu di masa-masa sebelumnya atau ketika layanan yang ada pada saat itu tidak memadai.

Dalam semua kasus tersebut, upaya-upaya LKM akan maksimal apabila upaya-upaya itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan semua organisasi terkait dan di dalam strategi penanganan krisis secara menyeluruh. Sesungguhnya, meskipun LK menjadi tugas pokok yang diamanatkan oleh ILO dan sudah menjadi keahliannya, keberhasilan penanganan krisis yang dilakukan ILO secara umum akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama dengan institusi-institusi PBB yang lain, otoritas nasional, termasuk instansi penanganan krisis pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, LSM, LK swasta, otoritas lokal dan para penyandang dana. Persoalan koordinasi menjadi semakin penting dan kompleks. Selain itu, lebih penting lagi, penanganan ILO melalui layanan ketenagakerjaan ini terkait erat dengan program penanganan krisis yang lain, dan bahwa LK sangat layak, diakui, dan digunakan oleh para pelaku pelaksanaan penanganan krisis yang lain.

Panduan LK dapat digunakan berbarengan dengan berbagai manual dan alat-alat bimbingan yang telah dibuat ILO di sejumlah bidang teknis yang terkait dengan penanganan krisis, dan alat-alat bimbingan yang serupa, untuk menguatkan dampaknya. Bersama-sama, instrumen-instrumen ini dapat meningkatkan penanganan krisis yang berbasis ketenagakerjaan.

Bab 1 panduan ini menggambarkan peran utama layanan ketenagakerjaan dalam pasar kerja pasca-krisis serta tujuan-tujuannya. Bab 2 memberikan contoh-contoh mengenai kemungkinan penanganan LKM dalam berbagai situasi pasca-krisis dan suatu pendekatan yang diusulkan dalam mengkaji

kebutuhan sebagai dasar bagi pengembangan penanganan-penanganan ini. Bab 3 memuat informasi yang lebih terperinci mengenai fungsi suatu LKM serta strategi intervensi untuk menangani kebutuhan-kebutuhan krisis yang telah teridentifikasi. Bab 3 juga mencakup bagian mengenai pemenuhan kebutuhan para pencari kerja yang berada pada kategori khusus seperti para pengungsi lokal, perempuan, mantan tentara, penyandang cacat, kaum muda dan lanjut usia.

Bab 4 mengamati persoalan-persoalan yang terkait dengan pengembangan layanan ketenagakerjaan pasca-krisis, termasuk pemilihan lokasi, penetapan tujuan-tujuan khusus, seleksi dan pelatihan staf, dan kebutuhan untuk bekerja sama dengan institusi-institusi lain serta organisasi kemasyarakatan. Bab 4 pun memuat daftar implementasi yang terperinci serta panduan perencanaan. Bab 5 menyediakan informasi dan bimbingan bagi atasan dan staf yang terdapat dalam Pusat LK mengenai pendekatan-pendekatan bagi keseluruhan manajemen dan pengoperasian Pusat LK tersebut. Bab 6 berisi ulasan singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam upaya meningkatkan operasi LKM dalam rentang waktu yang lebih panjang dan berkelanjutan.

Bagian Lampiran menyediakan informasi yang lebih terperinci mengenai pembangunan dan pengoperasian pusat layanan ketenagakerjaan; pada khususnya, penjelasan mengenai fungsi-fungsi dan langkah-langkah khusus, bersama dengan formulir-formulir dasar dan dokumen-dokumen lain yang biasanya digunakan oleh LK.



PANDUAN MENDIRIKAN
LAYANAN
KETENAGAKERJAAN
UNTUK MASYARAKAT
INDONESIA

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

Kantor Perburuhan Internasional



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan Ketenagakerjaan (LK) merupakan elemen kunci dalam pasar kerja dan peran yang dimiliki LK adalah membangun jembatan-jembatan yang penting bagi pencari kerja dan kesempatan kerja yang ada. Peran yang dikenal secara luas ini menjadi lebih penting lagi di masa-masa krisis, akibat bencana alam, dan gelombang tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada masa-masa yang penuh tantangan ini, terjadi perubahan-perubahan besar dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja yang muncul secara lebih cepat ke arah yang lebih tidak dapat diramalkan; dan kebutuhan-kebutuhan akan kesempatan kerja yang lebih mendesak.

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini muncul sedini munculnya fase kemanusiaan. Biasanya, banyak orang telah kehilangan pekerjaannya dan sumber kehidupannya, sementara yang lain mungkin baru pertama kalinya menghadapi kebutuhan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi mereka (janda-janda, para pengungsi, serta orang yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal). Kesempatan-kesempatan kerja yang sebelumnya ada mungkin telah hilang (terutama di sektor formal), sehingga pilihan untuk bekerja mandiri juga perlu dipertimbangkan. Pada saat yang sama, pekerjaan-pekerjaan baru seperti rekonstruksi fisik, pembangunan tempat penampungan sementara, pendistribusian bantuan pemulihan, dan pelayanan reintegrasi sosial-ekonomi semuanya membutuhkan tenaga kerja. Kondisi yang ada ini memerlukan sejumlah pekerjaan pokok yang biasanya dibentuk oleh kantor-kantor layanan ketenagakerjaan; khususnya seperti pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan-lowongan kerja, mempertemukan antara pencari kerja dan lowongan kerja yang ada (termasuk rekrutmen pekerja untuk program-program ketenagakerjaan khusus seperti pekerjaan umum) dan upaya untuk

memastikan tidak ada tindakan diskriminatif dalam pemberian akses kesempatan kerja (bagi kaum perempuan, kaum muda, manusia lanjut usia, mereka yang cacat, kelompok etnis dan minoritas.) Pekerjaan-pekerjaan terkait meliputi pelaksanaan penilaian pasar kerja lokal dan nasional yang cepat, penyediaan orientasi ketenagakerjaan, menyarankan pelatihan bagi orang-orang dan penyediaan bimbingan bagi mereka yang ingin bekerja mandiri.

Meskipun demikian, pengalaman memperlihatkan bahwa dalam keadaan pasca-krisis kontribusi-kontribusi potensial yang dapat diberikan oleh layanan ketenagakerjaan dapat diabaikan begitu saja. Untuk menangani berbagai perosalan ketenagakerjaan ini ILO *In Focus Programme on Crisis Response and Reconstruction* (IFP/CRISIS), telah membuat proyek-proyek percontohan untuk memperkenalkan pusat-pusat LK sementara, terkadang terdiri dari sebuah tenda di mana suatu kelompok kecil staf melaksanakan kegiatan pencocokan pekerjaan yang sifatnya mendasar, yang dapat diubah secara bertahap menuju layanan ketenagakerjaan yang lebih solid dan lebih permanen.

1.2 Tujuan Panduan ini

Pengaturan pelaksanaan LK berbeda antara satu negara dengan negara lain dan di sejumlah wilayah, Agen Ketenagakerjaan Swasta juga beroperasi di bidang ketenagakerjaan –sering kali dengan spesialisasi layanan rekrutmen untuk pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri tertentu. Meskipun demikian, Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat (LKM) biasanya menyediakan layanan-layanan yang lebih umum bagi para pencari pekerjaan dan pengusaha, dan merupakan salah satu fungsi Departemen Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Panduan ini disiapkan untuk membantu para praktisi mengembangkan layanan ketenagakerjaan yang efektif dan efisien dalam keadaan krisis dan membantu memastikan kontribusi layanan jangka panjang dalam pembangunan kapasitas kelembagaan LKM. Fokus utamanya pada penanganan-penanganan LKM dan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya.

Panduan ini akan menyediakan pedoman yang siap diakses dan mudah digunakan oleh staf ILO, konstituen-konstituen ILO dan para praktisi krisis lainnya. Panduan ini dirancang untuk memberikan acuan yang cepat mengenai keseluruhan permasalahan yang terkait dengan pengenalan layanan

ketenagakerjaan. Panduan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang mengandung lebih banyak informasi yang terperinci mengenai pendirian dan pelaksanaan suatu Pusat Layanan Ketenagakerjaan (PLK).¹ Panduan ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus kondisi krisis dan tingkat pembangunan yang sangat beragam, serta mengarahkan aksi penanganan cepat.

Penerbitan ini dapat digunakan bersama-sama dengan manual-manual lain maupun alat-alat panduan serupa yang telah dikembangkan oleh ILO di sejumlah bidang yang terkait dengan penanganan krisis. Beberapa di antaranya mengetengahkan aspek penawaran dan permintaan pasar kerja, seperti pelatihan, pembangunan ekonomi daerah, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur ketenagakerjaan yang intensif, koperasi, jender, mantan tentara atau prajurit, dan lain-lain; yang lain mengetengahkan aspek pendekatan penanganan krisis seperti kajian kebutuhan cepat (Lihat referensinya di Lampiran 1). Panduan ini bukan hanya akan melengkapi sumber-sumber ini tetapi juga memperkuat dampaknya.

Penekanan diberikan pada penyediaan panduan untuk mengembangkan penanganan cepat dalam konteks pasca-krisis. Meskipun demikian, dokumen ini mencakup lampiran-lampiran yang menawarkan panduan bagi operasi harian LKM. Panduan ini menyediakan deskripsi terperinci mengenai prosedur, catatan-catatan, persyaratan laporan dan pemberian kode untuk berbagai transaksi dan kegiatan; serta contoh-contoh pernyataan tugas, rencana operasional dan perincian mengenai pembangunan *pangkalan data* pasar kerja.

Daftar referensi yang digunakan dalam mempersiapkan panduan-panduan ini dapat dilihat di Lampiran 1.

1 Terminologi PLK digunakan dalam panduan ini untuk mengacu pada kantor LKM yang bersifat individual.





PANDUAN MENDIRIKAN LAYANAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

BAGIAN 2

KEADAAN KRISIS DAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN- KEBUTUHAN

Kantor Perburuhan Internasional



2. KEADAAN KRISIS DAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN

2.1 Memahami Keadaan

Krisis dapat terjadi di berbagai negara karena pelbagai macam alasan dan dalam banyak kondisi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dampaknya pada kehidupan masyarakat selalu meluas dan berat. Konsekuensi-konsekuensinya dapat mencakup kehancuran infrastruktur fisik dan sosial, hilangnya fasilitas produksi dan rumah-rumah, penduduk yang kehilangan tempat tinggal (pengungsian), dan hilangnya pekerjaan dan pendapatan.

Penanganan ILO terhadap berbagai situasi ini akan sangat baik jika menjadi bagian dari kolaborasi yang melibatkan institusi-institusi PBB yang lain, kementerian-kementerian pemerintah tertentu, organisasi-organisasi pengusaha dan buruh, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) dan otoritas setempat. Karena soal koordinasi menjadi makin penting dan kompleks, adalah sangat vital bahwa usulan penanganan ILO dalam kaitannya dengan layanan jasa ketenagakerjaan dikaitkan erat dengan strategi-strategi penanganan lainnya dan segera diimplementasikannya proyek-proyek yang telah disetujui.

Deskripsi terperinci mengenai mekanisme koordinasi baik dalam hal koordinasi kebijakan di tingkat pusat serta koordinasi operasional dan strategis

di lapangan dapat dilihat dalam Publikasi ILO, “*Coordination in Crisis Response and Reconstruction*” (Koordinasi dalam Menangani Krisis dan Rekonstruksi)²

2.2 Penanganan ILO terhadap Krisis

ILO telah membuat beragam dokumen mengenai penanganan krisis, termasuk manual yang berjudul “*ILO Generic Crisis Response Modules*” (Modul Umum ILO untuk Penanganan Krisis), yang dirancang untuk mendorong koherensi dan konsistensi penanganan krisis dan untuk menjabarkan strategi-strategi potensial yang cocok untuk situasi krisis tertentu. Para pembaca harus merujuk pada dokumen ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih terperinci mengenai konteks keseluruhan penanganan.

ILO menangani krisis akibat empat jenis situasi: bencana alam, krisis keuangan dan ekonomi, konflik bersenjata, dan transisi sosial dan politik yang sulit. Seringkali, suatu krisis terjadi akibat banyak sebab, kombinasi dua atau lebih faktor, yang kemungkinan akan menambah kerumitan kondisi tersebut.

Kriteria dasar berikut ini merupakan dasar-dasar pertimbangan ILO dalam mengambil keputusan untuk ikut menangani suatu krisis atau tidak:

- § Derajat krisis yang berkaitan dengan dampak kemanusiaan yang terjadi atau akan terjadi di bidang ketenagakerjaan, kemiskinan, keterasingan sosial, dan keamanan sosial-ekonomi;
- § Tingkat keprihatinan PBB dan derajat keterlibatan yang direncanakan oleh sistem PBB;
- § Keinginan yang disampaikan pemerintah dan konstituen-konstituen ILO mengenai suatu penanganan yang diberikan ILO;
- § Derajat pengembangan dan kemampuan suatu negara menangani rehabilitasi dan pemulihan;
- § Kajian mandiri ILO mengenai kebutuhan untuk, dan kelayakan penanganan yang akan diberikan; dan

2 Calvi-Pariseti, P. dan Kiniger-Passigli, D. : *Coordination in crisis response and reconstruction* (Geneva, ILO, 2002).

§ Ketersediaan sumber daya ILO, termasuk bukan hanya kemampuan teknis tetapi juga daya dukung keuangan dan sumber daya manusia.³

2.2.1 Persoalan-persoalan Utama

Situasi pasca-krisis seringkali dibarengi dengan tingginya tingkat pengangguran dan pengangguran terselubung, penurunan pendapatan yang drastis, orang-orang yang tinggal jauh dari komunitas atau lingkungan tempat tinggalnya, pengungsian, korban-korban yang mengalami trauma, dan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan yang lain. Pada saat yang sama, kurangnya keterampilan juga mulai muncul akibat naiknya permintaan akan keterampilan-keterampilan tertentu ketika upaya kemanusiaan dan rekonstruksi mulai dijalankan.

Dalam situasi seperti ini, kepedulian ILO yang utama adalah bagaimana meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dilandasi prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, keamanan dan martabat manusia. Agenda Pekerjaan yang Layak ILO terdiri dari hak-hak penting yang memungkinkan masyarakat berkembang dan meningkatkan kemampuan produktivitas mereka dan terlepas dari kemiskinan. Itu semua mengintegrasikan keprihatinan ekonomi dan sosial dan dirangkum dalam empat tujuan strategis berikut ini:

- § Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja
- § Terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi perempuan dan laki-laki
- § Perlindungan sosial
- § Dialog sosial

Pekerjaan yang produktif memang merupakan strategi penyesuaian yang kuat. Pekerjaan yang produktif memberi penghasilan bagi para korban krisis serta mengangkat martabat, kepercayaan diri, harapan dan bagian dalam proses perdamaian bagi mereka, saat membantu membangun kembali dan mengupayakan stabilitas komunitas mereka. Selain itu, proses rekonstruksi,

3 Kriteria intervensi ILO terdapat dalam ILO: Modul Generik untuk Menangani Krisis (*ILO: Generic Crisis Response Modules*) (Jenewa, 2001), hal. 11.

rehabilitasi dan reintegrasi pasca-krisis yang berbasis pada pekerjaan yang layak juga membuka jendela kesempatan untuk mencapai keadilan sosial, menangani permasalahan ketidakadilan gender, mengurangi kerentanan, memastikan kelangsungan keamanan dan perdamaian; dan oleh karenanya menempatkan komunitas pada jalan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penciptaan lapangan kerja harus menjadi sasaran yang jelas dan senantiasa tersedia.

2.3 Pelaksanaan LKM

Jasa layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dalam situasi pasca-krisis. Penanganan-penanganannya dapat beragam tergantung pada sifat dan jangkauan krisis tersebut. Peran-peran tersebut dapat mencakup dukungan bagi prakarsa-prakarsa khusus yang dikembangkan untuk membantu kelompok-kelompok sasaran tertentu atau menyediakan bantuan ketenagakerjaan yang lebih umum bagi semua yang terkena dampak krisis tersebut.

Pelaksanaan apapun yang diusulkan oleh LKM harus dipertimbangkan dalam konteks mandat ILO dan dalam membentuk penanganan tersebut, enam bidang kepedulian utama berikut ini harus dipertimbangkan:

- § Hak Asasi Manusia (Prinsip-prinsip dasar ILO, keadilan sosial, hak-hak dasar dan pendekatan tripartit);
- § Situasi mikro dan makro ekonomi (ekonomi yang menyusut atau bertumbuh, tren harga, tingkat kemiskinan, tren dalam perdagangan luar negeri, arus masuk modal luar negeri dan pembayaran);
- § Situasi pasar kerja (pengangguran dan pengangguran terselubung dan permintaan serta penawaran atas berbagai jenis tenaga kerja, kemampuan dan kebutuhan pelatihan, kebijakan pasar kerja dan tingkat upah yang mencerminkan realitas di daerah tersebut dan sekitarnya);
- § Konteks sosio-kultural dan politik (terutama keamanan, permasalahan gender, kerentanan, pengasingan sosial dan

kelompok-kelompok sasaran kunci);

- § Mekanisme dialog sosial (terutama peran mitra sosial ILO dan cakupan rekonsiliasi dan perdamaian); serta
- § Perlindungan sosial (jaminan sosial, cakupan dan potensi sistem berbasis komunitas dan sistem nasional yang modern dan tradisional).

Karena itu penting memastikan bahwa jasa layanan ketenagakerjaan masyarakat pasca-krisis yang diusulkan akan mendapatkan dukungan penuh dan diakui kepemilikannya oleh jajaran kementerian negara yang bersangkutan (biasanya Departemen Tenaga Kerja, apabila ada). Apabila suatu kantor kecil dioperasikan sebagai proyek percontohan, kelompok sasaran harus ditentukan dan tujuan-tujuan khusus harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan pencapaiannya berdasarkan ketersediaan staf dan jangan menciptakan harapan-harapan yang tidak realistis. Pengaturan-pengaturan tersebut harus dikonfirmasi melalui suatu perjanjian bersama antara pihak-pihak yang terkait, yang mencakup jasa layanan ketenagakerjaan awal yang akan disediakan, tanggung jawab masing-masing pihak, kerangka waktu dan kesepakatan hasil yang hendak dicapai. Formalitas ini akan membantu menghilangkan kebingungan dan penundaan, akan menyediakan suatu basis untuk memonitor kemajuan dan akan membantu memastikan keberlanjutan jangka panjang LKM setelah pendanaan awal proyek tersebut berakhir.

Apabila tidak ada LKM dan Departemen Tenaga Kerja tidak memiliki kemampuan membantu program percontohan PLK, pilihan-pilihan implementasi lain harus dipertimbangkan, termasuk menjalin kemitraan dengan kementerian yang lain, institusi-institusi internasional atau LSM.

Dalam situasi krisis seperti apa pun, penanganan awal LKM harus terkait dengan intervensi yang bersifat segera, dan dalam jangka pendek dengan prioritas untuk membantu kelompok-kelompok sasaran yang telah diidentifikasi. Penting untuk ditekankan bahwa LKM tidak boleh bertindak sendiri dalam situasi-situasi seperti ini, dan bahwa upaya-upaya LKM akan maksimal apabila dilakukan dalam kolaborasi dengan organisasi-organisasi nasional dan internasional lain yang terkait, terutama yang berasal dari sistem PBB dan dalam konteks kegiatan penanganan krisis secara menyeluruh. Setelah

beberapa waktu, kegiatan-kegiatan LKM pasca-krisis dapat meningkat secara progresif menjadi struktur yang lebih permanen yang terintegrasi dalam struktur administrasi ketenagakerjaan negara.

2.3.1 Kegiatan-kegiatan Layanan Utama

ILO telah terlibat dalam upaya luas yang terdapat dalam sistem PBB dan di beberapa peristiwa ILO juga pernah mengambil tindakan atas prakarsanya sendiri untuk mengembangkan komponen-komponen layanan ketenagakerjaan sebagai penanganan kondisi pasca-krisis. Hal ini mencakup penanganan kondisi krisis di Timor Leste, Pecahan Yugoslavia, Indonesia, Namibia, Palestina, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan yang terbaru adalah Afganistan dan Sri Lanka.⁴

LKM pasca-krisis harus bersifat fungsional, dapat dilihat, dan menjadi titik acuan yang diketahui oleh para pencari kerja dan pengusaha.

Selain dalam kondisi krisis, ada sejumlah fungsi atau jasa layanan utama yang dapat dijalankan oleh LKM, dan meskipun ada variasi dari satu negara ke negara lain, fungsi atau jasa tersebut biasanya mencakup hal-hal berikut ini:

- § Pendaftaran dan pemberian saran kepada pencari kerja.
- § Pendampingan dengan pengusaha dan mengisi lowongan-lowongan.
- § Mengumpulkan dan menyebarkan Informasi Pasar Kerja (IPK).
- § Memenuhi kebutuhan pencari kerja dengan kategori-kategori khusus.
- § Merencanakan dan mengatur langkah-langkah ketenagakerjaan khusus dan pelatihan.

Jasa atau fungsi ini mungkin harus diadaptasikan atau disusun secara khusus untuk menghadapi situasi tertentu. Jasa layanan atau pendekatan baru memang harus dilakukan apabila sebelumnya tidak ada layanan seperti itu atau layanan yang ada pada saat ini sudah tidak memadai lagi.

4 Informasi lebih lanjut mengenai tanggapan krisis ILO tersedia di ILO : Orang-orang dan Negara-negara yang terkena dampak krisis (ILO : *Crisis-affected people and countries*) (Jenewa, 2001)

Contoh-contoh berikut ini menyoroti serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan dalam menangani situasi krisis tertentu.

2.3.2 Bencana Alam

Bencana alam sering terjadi akibat kekuatan alam yang merusak yang datang tiba-tiba, seperti gempa bumi, tsunami, banjir atau badai tropis yang membawa dampak pada masyarakat dan mengakibatkan kematian, kerusakan infrastruktur dan alat-alat produksi yang parah, serta hilangnya pekerjaan yang meluas. Penanganan pertama akan datang dari institusi-institusi yang terlibat dalam upaya penyelamatan segera dan bantuan kemanusiaan. Kadang-kadang, peran ILO dimulai pada tahap pertama tetapi menjadi lebih intensif di tahap kedua, yang melibatkan proses penempatan kembali dan bantuan ketenagakerjaan.

Bencana Alam	
Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
Kebutuhan Penempatan kembali	• Penanganan cepat dengan mengirimkan staf LKM ke pusat-pusat pendaftaran dan penempatan sementara/bergerak • Bantuan rekrutmen untuk tenaga kerja pasca-krisis dan kebutuhan-kebutuhan pengiriman
Rekonstruksi	• Bantuan dalam rekrutmen pekerja untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pemulihan pasca-krisis • Promosi proyek-proyek/strategi-strategi berbasis tenagakerja

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
	• Rekrutmen untuk proyek-proyek pekerjaan umum • Promosi kesempatan pelatihan di tempat kerja
Hilangnya Banyak Pekerja	• Program pendaftaran bagi mereka yang kehilangan pekerjaan/penghidupannya • Penyediaan saran dan informasi bagi pencari kerja dan institusi-institusi pasca-krisis • Saran dan bantuan dengan program-program penempatan kembali dan pilihan ketenagakerjaan alternatif
Kekurangan Keterampilan	• Identifikasi keterampilan dalam permintaan dan penawaran • Identifikasi penyedia jasa pelatihan • Promosi pelatihan-pelatihan untuk menutupi kekurangan keterampilan • Identifikasi kesempatan pelatihan keterampilan di tempat kerja

2.3.3 Krisis Keuangan dan Ekonomi

Banyak faktor yang mengakibatkan krisis ekonomi, tetapi hasilnya akan selalu menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya, serta menghadapi penurunan upah dan pendapatan. Meskipun beberapa industri terkena dampak yang lebih parah dibandingkan industri lain, dampaknya tetap dirasakan di seluruh bidang perekonomian.

Dalam jenis krisis seperti ini, infrastruktur pemerintahan sering kali tetap berdiri dan ILO dapat bekerja dengan lebih baik dengan kementerian-kementerian terkait. ILO biasanya mengusulkan penanganan dan program LKM yang dibangun dalam operasi layanan ketenagakerjaan yang ada untuk membantu para pekerja yang menganggur berpartisipasi dalam program-program yang terkait dengan reformasi struktural, melatih kembali dan merekayasa para pekerja. Meskipun demikian, pelatihan staf dan pembangunan kapasitas bagi LKM mungkin dibutuhkan agar dapat menghadapi tantangan-tantangan baru.

Krisis Keuangan dan Ekonomi	
Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
Penyusutan jumlah pekerja dalam skala besar	• Pendaftaran orang-orang yang terkena dampak program penyusutan jumlah pekerja dalam jumlah besar • Kantor-kantor sementara di lokasi untuk menawarkan seminar-seminar pra-penyusutan jumlah pekerja tersebut (misalnya, mengenai tunjangan penghematan, kemungkinan-kemungkinan pekerjaan alternatif, pilihan-pilihan pelatihan kembali, teknik-teknik mencari

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/ LKM
	pekerjaan) dan layanan pendaftaran • Dukungan untuk strategi-strategi komunitas untuk meminimalisasi atau mencegah penyusutan jumlah pekerja
Tingginya tingkat pengangguran dan pengangguran terselubung	• Bantuan bagi orang-orang yang menganggur (misalnya, menyediakan keterampilan untuk mencari pekerjaan dan menyiapkan daftar riwayat hidup) • Saran dan bantuan dalam program-program pelatihan kembali dan penempatan kembali • Meningkatkan kesempatan bekerja mandiri • Menyediakan informasi mengenai pelatihan-pelatihan dan penyedia jasa pelatihan
Pengorganisasian kembali dan reformasi industri	• Saran mengenai perubahan pilihan karir • IPK mengenai permintaan yang timbul bagi keterampilan tertentu • Promosi prakarsa ketenagakerjaan daerah

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/ LKM
Perlindungan sosial terbatas	• Rekrutmen untuk program-program pekerjaan umum • Saran mengenai rancangan program-program ketenagakerjaan jangka pendek dengan komponen perburuhan yang luas (dengan komponen yang berarti, bukan komponen yang “hanya dibuat” begitu saja) • Implementasi asuransi pengangguran dan program-program dan strategi-strategi perlindungan sosial • Saran mengenai rancangan program-program jejaring pengaman sosial

Bantuan Ketenagakerjaan di Sierra Leone

Atas permintaan dan dalam kolaborasi dengan Kementerian Perburuhan, Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial di Freetown, pada tahun 2001, ILO memulai suatu Proyek Dampak Ketenagakerjaan Cepat untuk mendukung proses konsolidasi perdamaian di Sierra Leone.

Proyek tersebut memfokuskan diri pada penguatan kapasitas Pusat-pusat Layanan Informasi Ketenagakerjaan (PLIK) untuk memungkinkan mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam reintegrasi kelompok-kelompok yang terkena dampak perang. Latihan pengembangan kapasitas tersebut bertujuan mereorientasi layanan-layanan PLIK menuju kemampuan untuk mempekerjakan diri sendiri dan kegiatan-kegiatan sektor informal.

Meskipun suatu jaringan kantor ketenagakerjaan sudah ada, kantor-kantor ini memiliki sumber daya yang sangat miskin dan kekurangan kapasitas untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang terkait dengan reintegrasi kelompok-kelompok tambahan yang terkena dampak konflik.

Pada fase pertama, ILO menyediakan dana awal untuk melaksanakan suatu kajian kebutuhan-kebutuhan pasar kerja yang cepat dan untuk mendirikan proyek percontohan PLIK untuk menyediakan layanan-layanan ketenagakerjaan. Kemudian kantor ini dilihat dapat menjadi model untuk memperbaiki kantor-kantor ketenagakerjaan kementerian yang lain di masa mendatang, dengan layanan-layanan untuk dicontoh di daerah-daerah lain yang memiliki masalah sama. Hal ini akan dilaksanakan sebagai bagian dari suatu program “*Employment for Peace*” (Ketenagakerjaan untuk Perdamaian) di mana ILO mencari donor yang akan menyediakan pendanaan untuk hal tersebut.

Pusat tersebut bertujuan membantu pencari kerja dalam menemukan pekerjaan dan untuk menyediakan informasi dan layanan referensi yang terkait dengan kesempatan untuk bekerja mandiri serta kesempatan pelatihan. PLIK juga membuat suatu *pangkalan data* informasi pasar kerja dengan profil keterampilan-keterampilan para pencari kerja, perincian kekurangan keterampilan, dan informasi mengenai institusi-institusi pelatihan.

Penekanan utama terletak pada bantuan bagi kaum muda yang terkena dampak perang. Untuk memperoleh dampak yang cepat, diusulkanlah suatu kemitraan dengan Komisi Nasional untuk Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi yang bertujuan membantu mantan tentara mendapatkan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi posisi-posisi yang terdapat dalam sektor informal yang dapat menyerap pekerja pemula dan memperbaiki kualitas pelatihan di tempat-tempat ini.

2.3.4 Konflik bersenjata

Dalam banyak situasi paska konflik, infrastruktur dan administrasi pemerintahan mungkin menjadi lemah atau hancur, menyebabkan kapasitas nasional dan ketersediaan sumber daya sangat terbatas. Meskipun terdapat pengaturan administrasi transisional, iklim politik tetap tidak menentu. Pengangguran sangat tinggi dan program-program khusus dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur sosial dan ekonomi dan untuk mengintegrasikan kembali para pengungsi dan mantan tentara. Tergantung pada kelompok sasarannya, lembaga dan kerangka waktu yang berbeda-beda dilibatkan dan terdapat permintaan untuk penanganan yang berbeda-beda. Misalnya, segera setelah gencatan senjata atau perjanjian perdamaian dicapai, para pengungsi mungkin mulai kembali dengan cepat, sementara para mantan tentara mungkin belum menjadi kelompok sasaran yang besar sampai setelah strategi demobilisasi diimplementasikan.

Konflik Bersenjata	
Permasalahan Pasca- Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
Pemulangan pengungsi	• Praktek-praktek pendaftaran gabungan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan dan kapasitas individual • Survei permintaan pasar kerja setempat • Program pemulangan untuk membantu pengungsi lokal
Demobilisasi Mantan Tentara	• Partisipasi dalam program-program demobilisasi

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
	• Seminar-seminar pra-pembebasan yang meliputi kemungkinan-kemungkinan pekerjaan, pilihan-pilihan pelatihan, teknik-teknik mencari pekerjaan dan reintegrasi ke dalam kehidupan sipil • Layanan informasi dan referensi • Hubungan-hubungan dengan layanan lokal, institusi-institusi pendukung dan bantuan psikologis • Informasi dan referensi untuk pelatihan kembali dan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil
Berbagai kelompok yang dirugikan yang membutuhkan bantuan bersifat segera	• Identifikasi kelompok-kelompok sasaran • Program-program dan layanan khusus untuk membantu kelompok-kelompok yang dirugikan yang menjadi prioritas (misalnya, para janda dan kepala keluarga perempuan lainnya, orang cacat, korban trauma, mereka yang mengalami gangguan psikologis)
Rekonstruksi	• Rekrutmen untuk proyek-proyek besar • Promosi strategi-strategi/proyek-

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
	proyek berbasis ketenagakerjaan • Identifikasi persediaan dan permintaan keterampilan yang muncul • Pengembangan kesempatan-kesempatan pelatihan keterampilan di tempat kerja
Pemulihan ekonomi	• Penyediaan IPK yang dapat diandalkan • Promosi prakarsa-prakarsa pengembangan kesempatan kerja lokal
Kapasitas institusional yang lemah	• Pembangunan kapasitas yang berkelanjutan dalam LKM • Integrasi layanan PLK percontohan ke dalam organisasi-organisasi nasional • Pelatihan-pelatihan dan bantuan teknis bagi staf yang terdapat dalam organisasi-organisasi peserta.

2.3.5 Transisi Sosial dan Politik yang Sulit

Negara-negara dalam masa transisi mungkin menghadapi reformasi ekonomi, sosial, politik dan keuangan. Kerangka waktu untuk transisi dan perubahan bisa berlangsung bertahun-tahun. Kebutuhan khusus mungkin beragam bentuknya, tetapi negara-negara ini menghadapi permasalahan yang sama.

Transisi Sosial dan Politik	
Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
Penyusutan atau kelebihan jumlah pekerja	• Layanan registrasi dan referensi • Dukungan penyusutan jumlah pekerja atau pengurangan pekerja • Layanan transisional, seperti bantuan dalam merestrukturisasi badan-badan usaha milik negara
Kekurangan keterampilan yang muncul dalam industri baru	• Penyuluhan dan bimbingan karir • Program pelatihan untuk memenuhi kekurangan keterampilan
Kapasitas institusional yang lemah	• Pembangunan kapasitas untuk organisasi-organisasi yang terkait dengan LKM nasional • Pelatihan-pelatihan dan bantuan teknis bagi staf di wilayah prioritas

Permasalahan Pasca-Krisis	Pilihan-pilihan penanganan ILO/LKM
Perlindungan sosial terbatas	• Peninjauan ulang sistem tunjangan/ bantuan yang ada • Pelaksanaan asuransi bagi pengangguran dan program-program dan strategi-strategi perlindungan sosial • Saran dalam merancang program-program jaminan sosial
Merestrukturisasi ekonomi	• Kompilasi, analisa dan penyebaran IPK • Program pasar kerja aktif, seperti pekerjaan umum • Informasi mengenai dan bantuan dengan kesempatan-kesempatan untuk bekerja mandiri

2.4 Kajian Kebutuhan-kebutuhan

Sebelum menentukan jenis penanganan yang dapat ditawarkan LKM, harus dibuat suatu kajian mengenai jangkauan dan sifat layanan yang sudah ada. Hal ini harus dilakukan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari *ILO Crisis Assessment Mission* (Misi Kajian Krisis ILO) yang lebih luas yang memeriksa dampak keseluruhan yang diakibatkan oleh krisis tersebut dan memformulasikan penanganan menyeluruh mengenai ketenagakerjaan dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait. Sejumlah metode yang berbeda-

beda dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi,⁵ dan perincian lebih lanjut mengenai pendekatan kajian yang menyeluruh mengenai penanganan krisis terdapat di “*Crisis response – Rapid Needs Assessment manual*” (Penanganan Krisis – Manual Kajian Kebutuhan Cepat) ILO.⁶

Pada saat sudah ada LKM, kajian kebutuhan-kebutuhan harus meliputi suatu peninjauan ulang mengenai seberapa memadai layanan-layanan yang sudah ada. Kuesioner berikut ini dapat membantu menelaah beberapa bidang kunci.

Transisi Sosial dan Politik		
Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Status Penyedia Jasa LKM	- Kementerian apakah yang bertanggung jawab atas LKM? - Bagaimanakah kerangka kerja peraturan yang berlaku bagi layanan-layanan LKM ini (misalnya, persyaratan klien	

5 World Association of Public Employment Services (WAPES) telah mengembangkan instrumen survei untuk melaksanakan kajian kebutuhan-kebutuhan untuk mengidentifikasi persyaratan bantuan teknis bagi LKM yang sudah ada. Informasi lebih lanjut tersedia di alamat situs web sekretariat WAPES (www.wapes.org).

6 Manual tersebut mengandung bagian-bagian terperinci yang terkait dengan pasar kerja dan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, termasuk persyaratan informasi yang dibutuhkan ketika sedang mengkaji kebutuhan-kebutuhan dari kelompok khusus yang rawan, pelatihan dan pendidikan kejuruan, layanan pengembangan UKM dan usaha.

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	untuk menggunakan layanan ini, batasan mengenai pergerakan pekerja, seperti persyaratan perizinan untuk bepergian dari satu distrik atau provinsi ke distrik atau provinsi lain)? • Hubungan seperti apakah yang dimiliki oleh suatu kementerian dengan kementerian-kementerian lain, (misalnya untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan) serta organisasi sektor swasta?	
Cakupan geografis, situs, klien dan pemberian pekerjaan	• Ada berapa kantor LKM yang sekarang beroperasi? • Apakah cakupannya? (berdasarkan provinsi, distrik dan daerah setempat) • Seperti apakah jenis-jenis pengusaha dan pekerja yang biasanya dilayani	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	oleh LKM? • Apakah tersedia layanan penuh di setiap lokasi? • Apakah kantor-kantor memiliki telepon, faks, komputer dan perabotan serta peralatan yang memadai?	
Jangkauan layanan yang tersedia pada LKM pasca-krisis	• Apakah tujuan-tujuan LKM? • Apakah kantor-kantor menyediakan layanan khusus? (misalnya untuk kesempatan kerja di luar negeri, pekerjaan santai, pekerjaan musiman) • Apakah LKM memiliki fungsi lain di luar layanan ketenagakerjaan? (misalnya inspeksi tenaga kerja, penyelesaian sengketa, pembayaran tunjangan pengangguran)	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan		
Kelompok-kelompok kunci yang terkena dampak	• Daerah atau komunitas yang manakah yang terkena dampak yang paling besar? • Apakah dampak krisis tersebut terhadap pekerja, pencari kerja dan pengusaha? • Berapa orang yang telah terkena dampak? (misalnya, jumlah pengungsi, jumlah yang telah kehilangan rumah dan pekerjaannya, jumlah yang akan dipindahkan berdasarkan jenis kelamin, usia dan latar belakang etnis) • Apakah terdapat kelompok-kelompok yang dirugikan yang membutuhkan bantuan khusus? (misalnya, tentara anak-anak, mantan tentara, janda dan kepala keluarga perempuan, penyandang cacat)	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Pendaftaran Klien, Bimbingan dan Layanan Informasi		
Layanan bagi para pencari kerja	• Apakah terdapat pengaturan pendaftaran pencari kerja, dan apabila ya, bagaimana pengaturan tersebut berjalan? • Apakah, apabila ada, layanan kajian pencari kerja dan layanan bimbingan yang disediakan pada saat ini? • Apakah jenis kajian yang dilakukan dan bagaimanakah hubungannya, apabila ada, dengan pelatihan-pelatihan dan kebutuhan keterampilan yang berada dalam persediaan yang terbatas dalam pasar kerja? • Untuk apakah kajian-kajian ini digunakan? (misalnya, apakah kajian ini diwajibkan sebelum menjalani pelatihan?) • Bagaimanakah tingkat	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	usaha yang ada pada saat ini bagi setiap layanan ini? (misalnya, jumlah pencari kerja yang dikaji, jumlah pencari kerja yang memperoleh bimbingan –berikanlah jumlah laki-laki dan perempuan yang dibantu) • Apakah terdapat dokumentasi mengenai apa yang terjadi pada pencari kerja setelah mereka mendapatkan bimbingan atau kajian? • Apakah ada kontak lanjutan? Berikan perinciannya. • Apakah LKM mengurus dana tunjangan pengangguran dan pembayarannya? • Apakah prosedur pendaftaran dan persyaratan yang berlaku bagi tunjangan pengangguran?	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Layanan bagi pengusaha dan hubungan dengan komunitas		
Pemberitahuan lowongan	• Apakah jenis pengusaha yang biasanya menggunakan jasa LKM? • Berapa banyak lowongan yang biasanya diterima oleh LKM setiap bulannya? • Berapa banyak lowongan yang saat ini diterima? • Apakah LKM mengkhususkan diri dalam mengisi lowongan jenis tertentu? (misalnya, lowongan bagi yang memiliki keterampilan/tidak memiliki keterampilan, pekerjaan musiman atau kasual)	
Kunjungan pengusaha	• Kontak seperti apakah yang dimiliki LKM dengan organisasi pengusaha, industri dan institusi pelatihan?	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	• Apakah LKM memiliki program kunjungan pengusaha berkala? • Apakah LKM menyediakan layanan bagi para pengusaha di sektor swasta dan sektor informal?	
Pengaturan Tripartit	• Pengaturan konsultatif apakah yang ada bagi partisipasi pemerintah, organisasi pengusaha dan perwakilan pekerja? • Apakah terdapat Dewan Penasehat atau mekanisme lain untuk membimbing dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan LKM? • Apakah Dewan tersebut memiliki komposisi tripartit?	
Kualitas Layanan		
Kualitas layanan yang disediakan	• Statistik apa saja yang tersedia yang menunjukkan tingkat	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	usaha bagi masing-masing kantor? • Berapa banyak pencari kerja yang terdaftar setiap bulannya? • Berapa banyak lowongan yang diumumkan setiap bulannya? • Berapa banyak pencari kerja yang ditempatkan dalam suatu kesempatan kerja setiap bulannya? • Apakah terdapat akses yang memadai untuk melayani para pencari kerja dan pengusaha? • Apakah terdapat dokumentasi pencari kerja, lowongan, dll yang terkomputerisasi? Apabila ya, tolong berikan keterangan.	
Informasi Pasar Kerja		
Frekuensi, jangkauan dan	• IPK seperti apakah yang saat ini disediakan oleh LKM? Bagi pencari kerja	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
cakupan pengumpulan data	dan pengusaha? Bagi analis pasar kerja dan pembuat kebijakan? • Bagaimanakah jangkauan dan cakupan informasinya? • Seberapa seringnya informasi tersebut dikumpulkan dan diperbaharui? • Bagaimana informasi tersebut ditampilkan dan disebarluaskan? • IPK apa saja yang diperoleh dari sumber-sumber lain?	
Kekurangan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan tren industri	• Apakah tersedia informasi mengenai tren pekerjaan dan industri? (misalnya, pekerjaan di mana terdapat kekurangan keterampilan, lokasi di mana terdapat permintaan atas pekerja)	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	• Apakah informasi disediakan di tingkat nasional, provinsi dan lokal? • Apakah tersedia informasi di bidang-bidang pertumbuhan ekonomi? • Apakah tersedia informasi mengenai institusi-institusi pelatihan dan pelatihan-pelatihan? • Apakah ada kebutuhan untuk membawa perubahan atau perbaikan terhadap informasi yang tersedia?	
Sumber-sumber informasi lain	• Apakah Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan statistik atau laporan-laporan pasar kerja? Seberapa sering? Untuk kelompok dan bidang apa? • Apakah institusi lain melakukan survei dan	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	membuat laporan-laporan? (misalnya, Departemen Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, organisasi-organisasi internasional, LSM) • Apakah tersedia hasil sensus nasional yang terbaru? Apakah hasil tersebut relevan dalam situasi pasca-krisis?	
Institusi Ketenagakerjaan Swasta		
Status dan cakupan geografis	• Berapa banyak institusi ketenagakerjaan swasta yang beroperasi di negara tersebut? • Apakah kerangka kerja perundang-undangan yang memungkinkannya beroperasi? • Di wilayah negara yang manakah institusi-institusi ketenagakerjaan swasta ini beroperasi? • Spesialisasi mereka berada dalam kategori pekerja/sektor apa?	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	• Bagaimanakah tingkat penempatan dalam pekerjaan dan kapasitas institusi-institusi ini?	
Jangkauan dan kualitas layanan	• Layanan apakah yang mereka sediakan dan berapa banyak lowongan yang mereka layani? • Apakah lembaga ketenagakerjaan swasta ini mengkhususkan diri pada kelompok sasaran tertentu? • Bagaimana tingkat kerja sama mereka dengan LKM? • Dari mana sumber pendanaan mereka dan berapakah bayaran yang mereka kenakan untuk pelayanan mereka? • Apa saja kegiatan lain yang mereka lakukan?	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Kesenjangan atau defisiensi dalam pengaturan yang ada dalam menangani tantangan-tantangan krisis		
Kajian mengenai kekurangan	• Apakah lokasi dan cakupan layanan LKM yang ada cukup memadai untuk memenuhi permintaan-permintaan baru? • Apakah layanan harus diubah atau dapat menjadi lebih baik lagi? Berikan keterangan. • Apakah pencari kerja dan pengusaha memiliki akses pelayanan yang memadai?	
Kesenjangan informasi	• Seberapa berguna IPK yang ada dalam memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok sasaran yang dibantu? • Apakah terdapat informasi kesempatan kerja dan pelatihan yang dibutuhkan yang belum tersedia pada saat ini? Berikan keterangan	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
Pelatihan staf dan peralatan	• Apakah secara umum para staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas tambahan? • Apabila tidak, di bidang apa saja pelatihan lanjutan itu mereka butuhkan? • Apakah manajer dan penyelia memiliki keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan pengawasan yang memadai? • Apabila tidak, di bidang apa saja mereka membutuhkan pelatihan lanjutan? • Apakah tempat yang ada cukup memuaskan atau apakah diperlukan tempat alternatif?	

Permasalahan	Pertanyaan Kunci	Catatan
	• Apakah peralatan, komputer dan perlengkapan kantor yang ada cukup memadai?	
Permasalahan-permasalahan lain	• Apakah terdapat hubungan antara asosiasi pengusaha dengan asosiasi pekerja? • Apakah layanan LKM memiliki orientasi pada klien? (tidak birokratis) • Apakah LKM memiliki sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang memadai?	

Temuan-temuan Kunci dan Rekomendasi

Bagian ini dapat digunakan untuk mengkonsolidasi penemuan-penemuan dari kajian kebutuhan-kebutuhan dan sebagai panduan untuk menyiapkan pilihan-pilihan penanganan.

Pilihan-pilihan Penanganan		
Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
Perencanaan untuk Pelaksanaan LKM	• Meninjau ulang dan menggunakan (apabila layak) perencanaan LKM tahap persiapan atau pra-krisis yang sudah dijalankan • Mengembangkan (sesuai dengan konsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja) penanganan-penanganan khusus dan intervensi cepat bagi kegiatan-kegiatan tertentu	• Mencari tahu apakah otoritas perencanaan krisis secara keseluruhan telah mengembangkan strategi untuk rekrutmen, penciptaan lapangan pekerjaan dan penanganan-penanganan lain yang terkait dengan ketenagakerjaan • Mengidentifikasi institusi nasional yang relevan atau kementerian yang harus bertanggung-jawab atas layanan ketenagakerjaan dan memperoleh komitmen serta kepemilikannya atas

Pilihan-pilihan Penanganan		
Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
		layanan LKM yang diusulkan • Mengkaji kelayakan LKM • Apabila diperlukan, mencari kesempatan untuk mendirikan LKM dalam kemitraan atau kolaborasi dengan institusi internasional atau LSM lain yang telah beroperasi (misalnya UNHCR atau IOM) • Mengembangkan penanganan khusus dan intervensi-intervensi cepat untuk kegiatan-kegiatan tertentu
Penerapan	• Menggunakan kapabilitas LKM yang ada untuk menerapkan	• Bernegosiasi dengan departemen pemerintah, LSM dan institusi

Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
	kegiatan-kegiatan yang diajukan • Mengadaptasi atau menguatkan layanan-layanan yang ada apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan • Menggunakan pendekatan kantor percobaan untuk memperoleh penanganan dan dampak yang cepat • Mempertimbangkan penggunaan penanganan jangka pendek yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu • Membangun hubungan yang kuat dan pengaturan kerja sama dengan badan-badan internasional dan	internasional yang terkait untuk menjalankan dan mendukung penanganan-penanganan layanan ketenagakerjaan masyarakat pasca-krisis • Menjalin kerjasama dengan semua pemain kunci pasca-krisis untuk menggunakan layanan yang diajukan • Memilih staf dari Kementerian terkait atau merekrut staf-staf baru untuk mendirikan dan mengoperasikan LKM percontohan • Menggunakan pendekatan kantor percobaan untuk memperoleh

Pilihan-pilihan Penanganan		
Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
	nasional lain yang terlibat dalam penanganan krisis	penanganan dan dampak yang cepat • Mempertimbangkan untuk penggunaan penanganan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan tertentu • Membangun hubungan yang kuat dan menjalin kerjasama dengan badan internasional dan nasional yang terlibat dalam penanganan krisis
Pilihan-pilihan Khusus	• Apabila sumber dayanya terbatas atau terdapat kekurangan keahlian, gunakan layanan LKM percontohan di lokasi-lokasi kunci untuk memperoleh dampak yang cepat dan memperoleh pengalaman	• Mendirikan LKM 'percontohan' dalam kemitraan dengan lembaga lain yang sudah beroperasi di lapangan. Pilihlah lokasi kunci dan susunlah tujuan-tujuan khusus

Pilihan-pilihan Penanganan

Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
	• Menyediakan pelatihan intensif dan bantuan bagi staf dalam pengoperasian layanan ketenagakerjaan • Menggunakan layanan sementara/bergerak untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil • Mengembangkan pengaturan layanan gabungan dengan institusi atau pengusaha ketika terdapat kebutuhan atas pendaftaran pencari pekerjaan dalam skala besar (misalnya, penempatan kembali, demobilisasi, penyusutan pekerja, pengungsi lokal)	• Membangun pengaturan kemitraan yang juga dapat membantu dalam program pengawasan dan kelanjutan jangka panjang • Menyediakan pelatihan intensif dan bantuan bagi staf-staf dalam pengoperasian layanan ketenagakerjaan • Mengembangkan pengaturan layanan gabungan dengan institusi atau pengusaha ketika terdapat kebutuhan atas pendaftaran pencari kerja dalam skala besar (misalnya, penempatan kembali, demobilisasi, penyusutan pekerja, pengungsi lokal)

Pilihan-pilihan Penanganan		
Permasalahan	Apabila sudah ada LKM	Apabila belum ada LKM atau kapasitas yang ada lemah
Informasi Pasar Kerja	• Menggunakan staf Departemen Tenaga Kerja atau konsultan lokal untuk menyediakan kajian pasar kerja cepat mengenai kekurangan keterampilan, sektor pertumbuhan, dan profil keterampilan pencari pekerjaan • Bekerja sama dengan otoritas lokal dan layanan statistik nasional	• Menggunakan konsultan lokal dan sumber daya kemitraan untuk melakukan kajian pasar kerja secara cepat

Perencanaan dan strategi pembangunan untuk jangka waktu yang lebih panjang

- Mendorong Departemen Tenaga Kerja untuk merencanakan arah LKM dalam jangka waktu yang lebih panjang
- Mendukung prakarsa dan strategi untuk:
 - Pengembangan kebijakan dan program
 - Mengembangkan Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional
 - Mengkaji ulang organisasi, struktur, dan ketenagakerjaan LKM yang ada
 - Meningkatkan kapasitas untuk memperluas layanan
 - Membangun dukungan politik bagi pengembangan LKM yang sedang berjalan
 - Mengintegrasikan LKM ke dalam Departemen Tenaga Kerja
 - Memastikan pendanaan yang berkelanjutan



PANDUAN MENDIRIKAN
LAYANAN
KETENAGAKERJAAN
UNTUK MASYARAKAT
INDONESIA

BAGIAN 3
FUNGSI LKM
PASCA-KRISIS

